

**SISTEM INFORMASI  
PENILAIAN ANGKA KREDIT  
UNTUK TENAGA BIDAN DI DINAS KESEHATAN DAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KLATEN**



**T E S I S**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2.

Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat  
Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan

Ngabdullah  
NIM E4A002031

**PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, 4 sub dinas dan 35 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 34 Pusat Pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan Sosial (PPKKS) dan 1 buah Laboratorium Kesehatan. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. <sup>i)</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan telah ditempatkan 1451 orang pegawai. Sejumlah 391 ( 29,94 %) diantaranya adalah tenaga bidan, yang terdiri dari 187 bidan pegawai tidak tetap ( 47,82 %) dan 205 bidan pegawai negeri sipil (52,18 %).

Bidan pegawai tidak tetap adalah bidan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kebidanan dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.

Bidan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan kebidanan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kebidanan <sup>2)</sup>.

Bidan merupakan salah satu rumpun jabatan fungsional kesehatan. Untuk dapat dinaikkan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi Bidan harus dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan.<sup>ii)</sup>

Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bidan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Sub Dinas Kesehatan Masyarakat mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang teknis fungsional kebidanan. Sedangkan bidang administrasi, dikendalikan oleh Sub Bagian Kepegawaian<sup>1)</sup>

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian tata Usaha di bidang kepegawaian, diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan bidan dalam melaksanakan pekerjaannya, untuk menjamin obyektivitas penilaian kinerja bidan, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten telah membentuk Tim Penilai Angka kredit Bidan<sup>iii)</sup>

Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Bidan dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat bidan.

Angka Kredit bidan dihitung dari setiap butir-butir kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang bidan. Unsur-unsur kegiatan bidan yang dinilai angka kreditnya terdiri atas : 1) Pendidikan. 2) Pelayanan Kebidanan. 3) Pengembangan profesi. 4). Penunjang kegiatan pelayanan kebidanan. <sup>2)</sup>

Berdasarkan studi pendahuluan dengan Tim Penilai Angka Kredit Bidan Kabupaten Klaten, informasi yang diharapkan untuk penghitungan angka kredit

bidan belum bisa dilakukan sesuai yang diharapkan. Beberapa hal yang menyebabkan adalah:

1. Ketepatan waktu.<sup>iv)</sup>

Pengolahan data pada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Bidan saat ini masih menggunakan komputer terbatas, sedangkan dengan beban yang banyak, tenaga tim penilai angka kredit bidan dirasa masih kurang jumlahnya. Dengan kondisi tersebut, maka laporan angka kredit yang harus dihasilkan pada awal bulan Agustus untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober dan awal Februari untuk periode kenaikan pangkat bulan April, selalu melampaui jadwal yang ditentukan, yaitu bulan September dan bulan Maret.

2. Kelengkapan<sup>4)</sup>

Pada saat ini penghitungan angka kredit hanya dihasilkan angka kredit bidan saja, belum menghasilkan laporan-laporan lengkap yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- Laporan daftar bidan yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat.
- Laporan daftar bidan berdasarkan distribusi masa kerja, pangkat/golongan Ruang-tmt.
- Distribusi bidan berdasarkan pangkat/golongan ruang.
- Distribusi bidan berdasarkan unit kerja.
- Distribusi bidan dengan masa kerja golongan 5 tahun atau lebih.

3. Kecepatan<sup>4)</sup>

Pada saat ini proses penghitungan angka kredit dilaksanakan secara manual dan *paper based* , sehingga waktu pemrosesan data hanya tersita untuk penghitungan saja. Untuk menghasilkan laporan angka kredit, diperlukan waktu yang lama.

#### 4. Keakuratan.<sup>4)</sup>

Dengan keterbatasan sumber daya manusia, komputer yang terbatas, penjadwalan pengiriman berkas usulan kenaikan pangkat bidan, maka tim penilai angka kredit tidak bisa melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan yang diajukan oleh tenaga bidan, sehingga laporan yang dihasilkan kurang akurat.

Untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam penilaian kinerja bidan guna pengangkatan dalam jabatan fungsional bidan memerlukan suatu sistem informasi yang dapat menyajikan informasi-informasi yang akurat, lengkap dan cepat:

- Laporan penetapan angka kredit dapat dihasilkan tepat waktu.
- Distribusi bidan per golongan untuk masing-masing Puskesmas. Dengan adanya informasi distribusi bidan bisa direncanakan kebutuhan bidan di Kabupaten Klaten.
- Daftar bidan Gol.III/b ke atas.
- Distribusi bidan dengan masa kerja golongan 5 tahun ke atas. Bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Bidan

Pelaksana, Golongan II/b sampai dengan Bidan Penyelia Golongan III/c, Bidan dibebaskan sementara dari jabatannya.<sup>2)</sup>

Pada saat ini perangkat keras di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten sudah tersedia, sehingga pengembangan software Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Bidan bisa dioperasikan.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan uraian latar belakang dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan saat ini, yaitu penilaian angka kredit di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten dalam pemrosesan data dilaksanakan secara manual dan dokumentasi data sebagian disimpan dalam *paper based* dan sebagian lagi disimpan dalam komputer. Penilaian angka kredit biasanya waktu tersita hanya untuk penghitungan angka kredit, sehingga tidak bisa menghasilkan informasi yang tepat waktu, sedangkan dengan keterbatasan waktu mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya verifikasi dan klarifikasi laporan, sehingga tidak bisa menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu pertanyaan, “ Bagaimanakah sistem informasi penilaian angka kredit untuk tenaga bidan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten ? “

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Klaten  
Memperoleh sistem informasi penilaian angka kredit bidan untuk membantu pengambilan keputusan dalam pengangkatan jabatan fungsional tenaga bidaan.

Memperoleh sistem informasi manajemen di lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten.

2. Bagi Peneliti

Membuka wawasan dan wacana serta menerapkan ilmu pengetahuan tentang Sistem Informasi Manajemen SDM.

3.                Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat menjadi informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengembangan sistem informasi manajemen SDM, khususnya tentang teknologi informasi.

**D.                Tujuan Penelitian**

1.                Tujuan Umum

Menghasilkan sistem informasi penilaian angka kredit untuk tenaga bidan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten.

2.                Tujuan Khusus

a.                Mengetahui masalah-masalah sistem informasi untuk penetapan angka kredit bidan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten.

b.                Mengetahui kebutuhan informasi yang digunakan Tim Penilai Angka kredit Bidan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten.

c. Menghasilkan basis data yang digunakan untuk penghitungan angka kredit bidan guna penentuan kenaikan pangkat, pemberian sanksi, perencanaan mutasi dan perencanaan promosi dalam jabatan.

d.                Menghasilkan sistem informasi yang dapat digunakan untuk penghitungan angka kredit.

e.                Mengevaluasi kualitas informasi penilaian angka kredit sebelum dan sesudah dikembangkan.



## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang Sistem Informasi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Penelitian tentang SDM yaitu perancangan sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga telah dilaksanakan oleh Hari Wiyono, 2003, dengan penekanan pada penghitungan kebutuhan tenaga pada Sub Din Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Dinas kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
2. Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Tenaga Keperawatan di RSUD Kota Yogyakarta oleh Kirnantoro, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2002. Penelitian yang bersifat eksploratif dengan cara menggali/mengumpulkan pendapat tenaga keperawatan tentang kesulitan yang dialami untuk memperoleh angka kredit, dan mengadakan wawancara mendalam dengan tim penilai angka kredit untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penilaian.

Sedangkan penelitian tentang sistem informasi penilaian angka kredit bidan ini, dengan penghitungan angka kredit yang dinilai dari butir-butir kegiatan bidan akan dihasilkan sistem informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan kenaikan pangkat. Metode penelitian adalah diskriptif kualitatif dengan pendekatan SDLC.



